

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM MENSEJAHTERAKAN
MASYARAKAT GAMPONG UJUNG PASIR KECAMATAN KLUET
SELATAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MONA SASMITA

NIM. 180404030

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Saru Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Diajukan oleh:

MONA SASMITA

NIM. 180404030

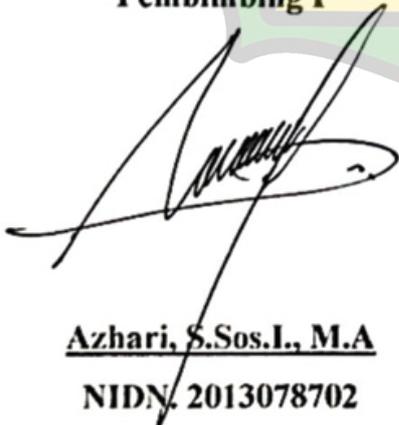
Disetujui oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II


Azhari, S.Sos.I., M.A

NIDN. 2013078702


Marini Kristina Situmeang, M.Sos., M.A

NIP. 199199111272020122017

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM MESEJAHTERAKAN
MASYARAKAT GAMPONG UJUNG PASIR KECAMATAN KLUET
SELATAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Serahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Diajukan Oleh:
MONA SASMITA
NIM. 180404030

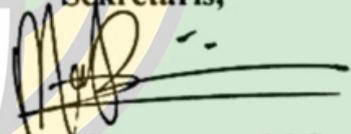
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 22 Desember 2023
9 Jumadil Akhir 1445 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Azhari, S.Sos.I., M.A
NIDN. 2013078702

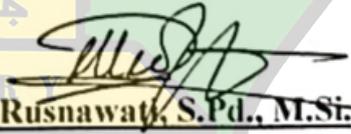
Sekretaris,


Marini Kristina Situmeang, M.Sos., M.A
NIP. 199199111272020122017

Penguji I,


Dr. Rasvidan, M.Ag
NIP. 197309091998032002

Penguji II,


Rusnawati, S.Pd., M.Si.
NIP. 197703092009122003



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Mona Sasmita

NIM : 180404030

Jenjang : S-1

Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam data pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata terbukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 Desember 2023

AR - RANIRY Yang menyatakan,

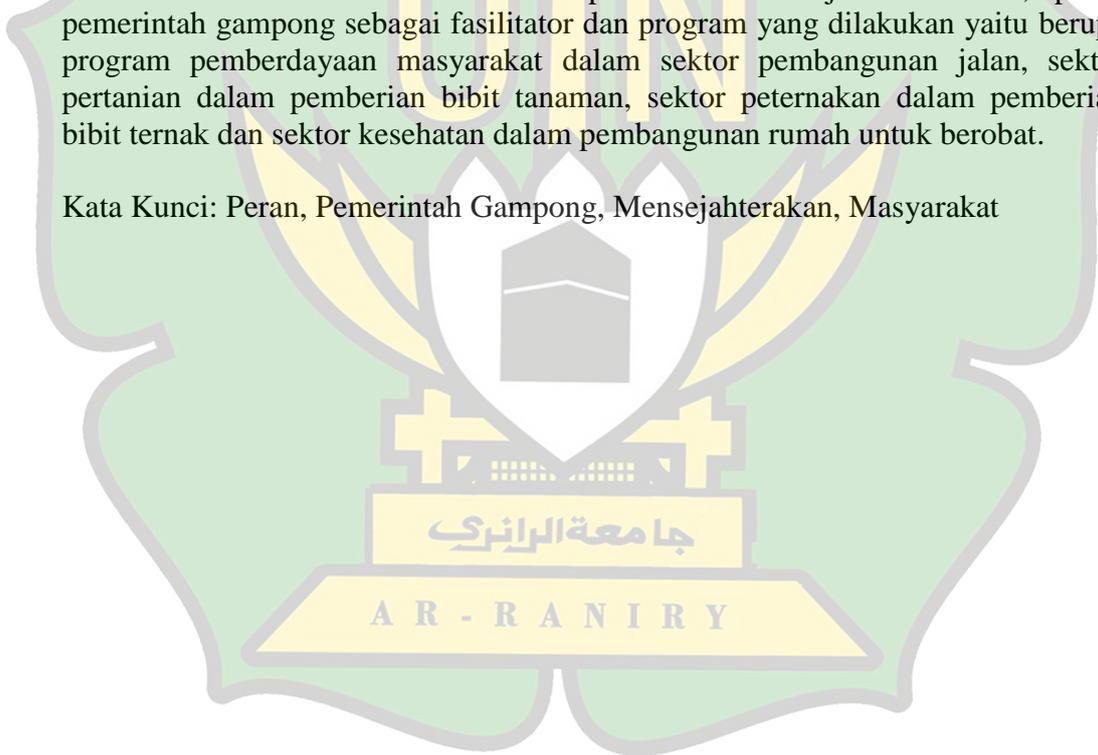


Mona Sasmita

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Gampong Dalam Mensejahterakan Masyarakat Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan”. Penelitian ini disebabkan adanya dampak yang baik, gampong Ujung Pasir adalah salah satu gampong yang masih kurang berkembang dalam sektor pembangunannya. Pemerintah gampong Ujung Pasir tidak hanya membentuk suatu program ataupun kegiatan yang akan dilakukan sehingga akan direalisasikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan apa saja program pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan mengetahui program pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu keuhick, sekretaris, bendahara, kasie pemerintahan, kasie kesejahteraan dan masyarakat gampong Ujung Pasir. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran pemerintah gampong sebagai fasilitator dan program yang dilakukan yaitu berupa program pemberdayaan masyarakat dalam sektor pembangunan jalan, sektor pertanian dalam pemberian bibit tanaman, sektor peternakan dalam pemberian bibit ternak dan sektor kesehatan dalam pembangunan rumah untuk berobat.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Gampong, Mensejahterakan, Masyarakat



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Gampong Dalam Mensejahterakan Masyarakat Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan”** dapat penulis selesaikan dengan baik, dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karya berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos).

Ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Terima kasih kepada Ayah dan Ibu saya yang telah mendampingi saya serta memberikan dukungan serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Ibu Dr. Rasyidah, M. Ag., selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus menjadi pembimbing akademik saya.
4. Bapak Azhari, S.Sos.I., M.A., selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus menjadi Pembimbing I saya yang selalu memberikan arahan serta dukungan dalam menjalankan penulisan skripsi saya.
5. Ibu Marini Kristina Situmeang, M.Sos., M.A., selaku dosen Pembimbing II yang telah membantu serta meluangkan banyak waktu untuk saya, memberikan arahan dan motivasi dalam menjalankan penelitian saya.
6. Kepada seluruh dosen Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan serta bimbingan selama menjalankan perkuliahan.

7. Kepada Mita Manja, Chairani Barasa, Khairun Nisa dan Aina Mardiah yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini

Banda Aceh, 26 Desember 2023
Penulis,

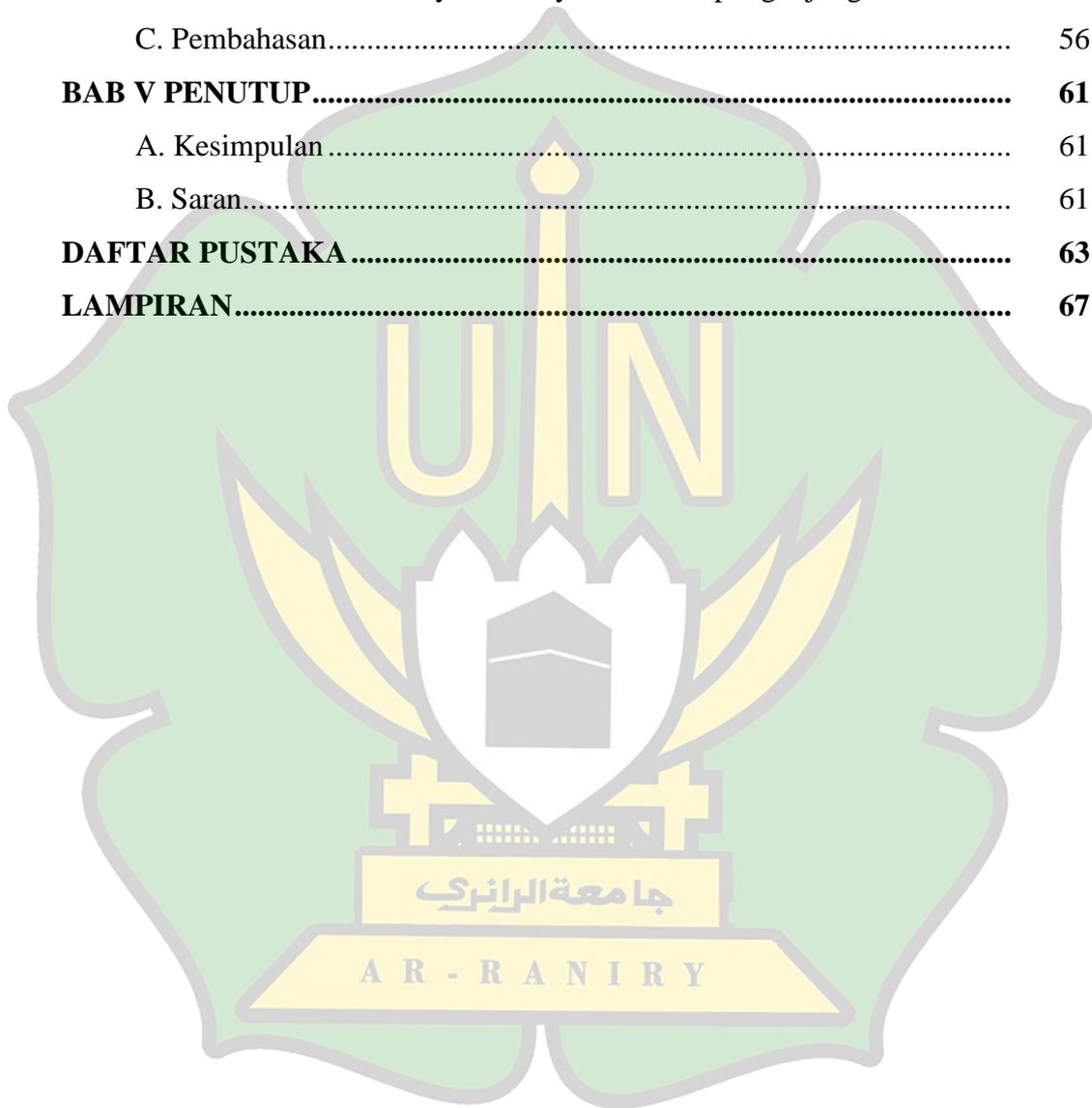
Mona Sasmita



DAFTAR ISI

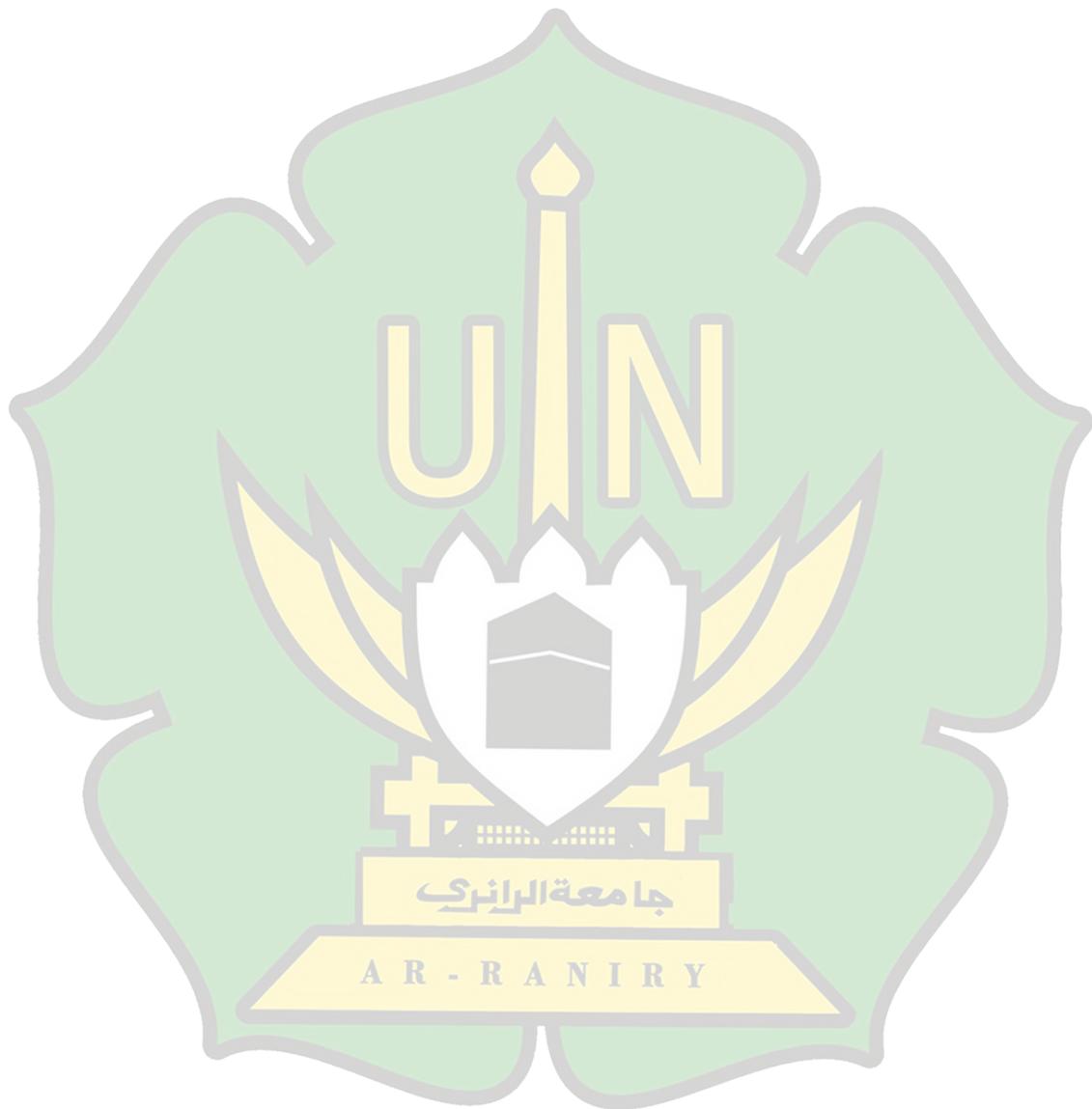
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitish Terdahulu	9
B. Batasan Teori	12
C. Pemerintah Gampong	19
D. Konsep Kesejahteraan	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Teknik Pemilahan Informan	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	31
F. Diagram Alur Peneltian	33
BAB VI PENYAJIAN DAN TEMUAN PENELITIAN.....	34
A. Demografi Penelitian	34
1. Sejarah Gampong Batu Itam.....	34
2. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	36
3. Visi Misi	36
4. Sarana Prasarana.....	37
5. Tugas dan Fungsi Pemerintah Gampong.....	37

6. Sarana dan Prasarana	41
B. Hasil Penelitian	43
1. Peranan Pemerintah Gampong Ujung Pasir Dalam Mensejahterahkan Masyarakat Gampong.....	43
2. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Ujung Pasir.....	53
C. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Kerangka Penelitian	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	37



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Juron/Dusun.....	35
Tabel 4.2 Sarana Formal dan Non Formal.....	41
Tabel 4.3 Kondisi Pengguna Tanah	42
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan gampong melibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam kerangka sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Perangkat gampong, sebagai elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, memiliki tugas kepala gampong yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat gampong. Wewenang gampong mencakup kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong, yang didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat gampong.¹

Wewenang gampong mencakup hak berdasarkan sejarah, kewenangan lokal tingkat gampong, serta tugas yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan posisi dan wewenang gampong, diharapkan pemerintah gampong dapat berkontribusi pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Konsep gampong sebagai unit politik kecil dalam pemerintahan merupakan landasan utama dalam strategi pembangunan nasional. Di samping itu, gampong memiliki potensi besar yang dapat berkontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

gampong merupakan wilayah yang didominasi oleh mayoritas penduduknya, dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala gampong.²

Meningkatkan kesejahteraan umum dan mengurangi kemiskinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menuntut pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian kepentingan bersama. Badan Usaha Pegampongan adalah badan hukum yang dibentuk bersama Gampong untuk mengurus pengembangan aset, menyediakan berbagai jenis usaha demi kepentingan masyarakat pegampongan, dan mengelola usaha tersebut. Tujuannya adalah melakukan kegiatan ekonomi melalui administrasi bisnis dengan beragam cara, sumber daya, dan mempertimbangkan lingkungan sekitar.³

Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah gampong, baik dari satu gampong ke gampong lainnya, terkait dengan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan melibatkan masyarakat dalam mengelola pembangunan pergampongan. Penting untuk memahami bahwa esensi dari pembangunan nasional yang menyeluruh adalah menempatkan dasar yang kuat untuk pembangunan di wilayah perkampungan. Kesenjangan antara perkotaan dan perkampungan, serta masalah kemiskinan di perkampungan, telah mendorong upaya percepatan pembangunan di kawasan pergampongan.⁴

Di Indonesia, jumlah penduduk miskin mencapai 81.847 jiwa, dimana lebih dari separuhnya tinggal di pedesaan dengan persentase 14,75%. Pada tahun

² Mario Juan C.S. Hidete, Arie J. Rorong, Novie. R. A. Palar. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawe Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. *JAP*. No. 114. Vol. VIII, 2022. Hlm. 37.

³ Rendi Perima Wardhana, peran masyarakat desa dalam mensejahterakan masyarakat Desa Melalui badan milik desa (BUMdes), (Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang).

⁴ Jumlah Penduduk Miskin di Aceh

2022, terjadi peningkatan sebanyak 11,7 ribu jiwa dalam jumlah penduduk miskin di pedesaan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan di pedesaan melibatkan masalah ekonomi, kondisi geografis yang terpencil, serta keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi. Dampaknya adalah keterbatasan akses masyarakat dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan, termasuk informasi dan teknologi yang relevan. Tantangannya bagi pemerintah adalah terus meningkatkan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan pembangunan pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Upaya terus dilakukan secara bertahap, termasuk peningkatan kapasitas aparat pemerintahan di tingkat gampong dan kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan masyarakat, pemberdayaan aspek adat dan sosial budaya, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, serta optimalisasi sumber daya alam dan penerapan teknologi yang sesuai. Langkah lain melibatkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal, dengan fokus meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Keterbatasan akses dan ketersediaan sarana prasarana di pedesaan, ditambah dengan kualitas pelayanan yang masih rendah, menjadi hambatan bagi percepatan pembangunan. Pelayanan terkait akses dan fasilitas gampong, seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, dan pasar, merupakan kendala yang perlu diatasi. Khususnya dalam upaya meningkatkan ekonomi di pedesaan, perlu dilakukan pengembangan sarana

⁵ *Ibid*

⁶ Minardi. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta. *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2015. Hlm. 5.

prasarana produksi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan.⁷

Gampong Ujung Pasir, yang terletak di pemukiman kandang di sepanjang jalan Kecamatan Kluet Utara, awalnya hanya terdiri dari satu dusun. Namun, karena pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk, kini Gampong Ujung Pasir telah berkembang menjadi tiga dusun. Masyarakat Gampong Ujung Pasir menekuni beragam profesi, termasuk sebagai petani, nelayan, pedagang, PNS, dan sebagian lainnya bekerja sebagai kuli bangunan. Secara geografis dan administratif, Gampong Ujung Pasir merupakan salah satu dari 17 gampong di Kecamatan Kluet Selatan, yang terintegrasi dalam 260 gampong di Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Ujung Pasir, yang memiliki luas wilayah lebih dari 75 hektar, secara topografis terletak pada ketinggian 1 hingga 2 meter di atas permukaan air laut. Jarak antara Gampong Ujung Pasir dengan Ibu Kota Kecamatan adalah sekitar 5 kilometer, sementara jarak ke Kabupaten mencapai sekitar 35 kilometer.⁸

Gampong Ujung Pasir merupakan salah satu gampong yang masih mengalami keterbatasan dalam perkembangan pembangunannya. Pemerintah setempat tidak hanya merencanakan program dan kegiatan, tetapi juga berupaya mewujudkannya dalam kenyataan. Meskipun demikian, Gampong Ujung Pasir berupaya untuk memastikan bahwa program-program yang diimplementasikan memberikan dampak positif dan respons baik dari masyarakat. Contohnya, program peningkatan kualitas SDM, administrasi pemerintahan, dan

⁷ *Ibid*

⁸ Profil Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet, Kabupaten Aceh Selatan.

pembangunan infrastruktur yang telah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah gampong, memberikan dampak positif pada masyarakat Gampong Ujung Pasir.⁹

Gampong Ujung Pasir melaksanakan program tahunan sejak 2019 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya melalui pemberian bantuan siaga pangan yang terus berlanjut hingga saat ini. Pemberian bibit mangga kepada seluruh masyarakat Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai bagian dari program bantuan siaga pangan, mengalami kendala dan tidak berjalan dengan baik.¹⁰

Pada tahun 2020, pemerintah Gampong Ujung Pasir memberikan bantuan siaga pangan berupa pupuk NPK dan OREA kepada masyarakatnya. Sementara itu, pada tahun 2021, pemerintah gampong melanjutkan program dengan menyediakan bibit ikan dan kambing untuk pendistribusian kepada masyarakat. Meskipun pemerintah gampong menyediakan beberapa program, hingga saat ini, masyarakat hanya memilih untuk mengikuti salah satunya. Program-program ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pada akhir Desember 2022, pemerintah gampong Ujung Pasir kembali menggelar program distribusi bibit ayam kepada penduduk gampong.¹¹

Penting bagi pemerintah gampong untuk efektif dalam memberikan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil prasarvei menunjukkan bahwa peran pemerintah gampong Ujung Pasir belum mencapai tingkat optimal. Dapat dilihat dari banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Gampong terkait pelayanan yang diterima dari pemerintah gampong. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik

⁹ Hasil wawancara masyarakat Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet, Kabupaten Aceh Selatan.

¹⁰ Hasil wawancara masyarakat Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet, Kabupaten Aceh Selatan.

¹¹ Hasil wawancara masyarakat Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet, Kabupaten Aceh Selatan.

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Peran Pemerintah Gampong Dalam Mensejahterakan Masyarakat Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa-apa saja program pemerintah gampong yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui program pemerintah gampong yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat-manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat berkontribusi sebagai sumbangan ideologis dengan memperluas pemahaman tentang peran pemerintah gampong dalam mengelola pemerintahan

masyarakat serta memberikan wawasan dalam menganalisis permasalahan untuk pengembangan pengetahuan dan pembelajaran.

2. Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa atau peneliti yang akan menjalankan penelitian mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, dan penelitian ini dapat menjadi dasar referensi.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan ini dimaksudkan untuk menguraikan makna atau definisi yang sesuai dengan konteks dan aspek masing-masing kata agar terhindar dari kesalahpahaman. Sehingga terdapat beberapa kalimat yang dipakai dalam penelitian yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Peran merupakan harapan kompleks terhadap perilaku dan tindakan individu dalam konteks tertentu, didasarkan pada status dan fungsi sosialnya, yang mencakup tugas utama sesuai dengan kedudukannya. Sehingga, banyak orang mengharapkan individu untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan perannya dalam masyarakat.¹²
2. Pemerintah gampong adalah instansi pemerintahan terendah yang berada di bawah langsung camat. Sebagai organisasi pertama yang berinteraksi dengan masyarakat, gampong memberikan layanan, bantuan, dan menangani berbagai urusan tingkat masyarakat. Oleh karena itu,

¹² Soejarno Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: CV Rajawali, 1986). Hlm. 220.

administrasi gampong perlu disesuaikan dengan kebutuhan seluruh instansi pemerintahan yang lebih tinggi.¹³

3. Kesejahteraan mengacu pada kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan utamanya, termasuk sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, kesejahteraan juga mencakup tingkat akses seseorang terhadap kepemilikan, di mana peningkatan dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi yang dimiliki dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya.¹⁴
4. Struktur peraturan di dalam suatu organisasi atau kelompok masyarakat bertujuan mendukung anggotanya dalam berinteraksi demi mencapai tujuan yang diinginkan.



¹³ Wahyuni. Strategi Pemerintah Desa Dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. (*Skripsi: Maanajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*). Hlm. 16.

¹⁴Suwandi, *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2015). Hal 194.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka untuk menentukan apakah penelitian sebelumnya telah dilakukan dalam bidang yang sama. Penulis menemukan skripsi dengan judul serupa yang akan dijadikan fokus penelitian, judul skripsi tersebut antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Goestyari	Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Gampong Way Urang) ¹⁵	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah Gampong Way Urang di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, belum berhasil memenuhi perannya sebagai stabilisator, inovator, pelopor, dan modernisator dalam pengelolaan Sumber Mata Air Panas Gampong Way Urang. Ini sejalan dengan kurangnya kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan standar hidup, keberdayaan, dan pilihan kesempatan yang sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan standar kemanusiaan.

¹⁵ Goestyari Kurnia Amantha. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 2021. Volume 47. No.1. Hlm. 67-79

2.	Mario	Peran Pemerintah Gampong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara ¹⁶	Hasil penelitiannya bahwa peran pemerintah Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat termanifestasi dalam penyediaan layanan yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas. Ini mencakup penetapan dan pelaksanaan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, pembinaan ekonomi gampong, advokasi aspirasi pembangunan masyarakat kepada pemerintah, serta dukungan terhadap implementasi program pembangunan pemerintah di gampong. Selain itu, peran tersebut juga mencakup perlindungan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial dan menjaga ketertiban di Gampong.
3.	Nartin dan Musin	Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan) ¹⁷	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama pandemi COVID-19, studi pada Kantor Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, mencakup tiga indikator. Pertama, peran sebagai Fasilitator belum optimal, terlihat dari ketidakmerataan pembagian bantuan oleh masyarakat. Kedua, peran sebagai Regulator telah diterapkan dengan memberikan arahan dan kebijakan, namun masyarakat belum sepenuhnya patuh. Ketiga, peran sebagai Katalisator dinilai efektif melalui

¹⁶ Mario Juan C.S. Hidete, Arie J. Rorong, Novie. R. A. Palar. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. *JAP*, 2022. Vol. VIII. No. 114, Hlm. 37.

¹⁷ Nartin, Yuliana Musin. Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *Sibatik Journal*, 2022. Vol.1. No. 3. Hlm. 163.

			program sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi terkait COVID-19 yang telah dilakukan sesuai tugas dan fungsinya.
4.	Muhammad Arifin dkk	Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ¹⁸	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat yang belum mencapai tingkat maksimal, serta pelayanan, ketertiban umum, dan pemeliharaan prasarana yang belum sepenuhnya memuaskan. Kegiatan dan program pemerintah kelurahan belum berjalan secara optimal, dan pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo masih belum mencapai tingkat optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo melibatkan faktor internal seperti pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta faktor eksternal seperti kemudahan.
5.	Meuthia	Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan	Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, inovator, dan katalisator telah diimplementasikan dengan cukup

¹⁸ Muh. Arifin, Alimuddin Said, Andi Nuraeni Aksa. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Mata Allo Kecmatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Otoritas*, 2013. Vol. III. No. 2. Hlm. 125.

		Bontobahari Kabupaten Bulukumba ¹⁹	baik. Namun, diperlukan intensifikasi metode pendekatan persuasif dalam setiap peran yang dilakukan agar terjalin hubungan yang harmonis dan seimbang antara pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Tanah Beru. Tujuannya adalah mencapai hasil optimal dan sesuai sasaran, dengan upaya mendorong kesejahteraan sosial, termasuk aspek ekonomi, sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan.
--	--	---	--

B. Batasan Teori

1. Teori Peran

Secara umum, peran merujuk pada serangkaian perilaku yang diantisipasi dari seseorang berdasarkan kedudukannya, yang dapat bersifat formal maupun informal. Beberapa juga menyebut bahwa peran memiliki makna sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu kejadian.²⁰ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau memegang peranan utama dalam terjadinya suatu peristiwa²¹. Berikut ini definisi peran menurut para ahli sebagai berikut:

¹⁹ Andi Meuthia A.M. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2019. Hlm.82.

²⁰ Nurul Izzati Lubis, *Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara Medan Tahun 2019. Hlm 18.

²¹ Feri Andi, *Peran Majelis Ta'lim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan (Studi terhadap Majelis Ta'lim Nurul Hidayah)*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Raden Fatah Palembang Tahun 2017. Hal 22

1. Abu Ahmadi berpendapat bahwa peran adalah harapan mengenai perilaku dan tindakan individu dalam situasi tertentu, yang ditentukan oleh status dan fungsi sosialnya.²²
2. Suekanto menyatakan bahwa peran adalah tugas yang dilaksanakan secara dinamis sesuai dengan status atau posisi yang dimiliki seseorang.
3. Katz dan Khan mendefinisikan peran sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan posisinya.²³

Menurut pandangan para pakar, dapat disimpulkan bahwa peran merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukan mereka. Kahn (1964) berpendapat bahwa teori peran (role theory) menitikberatkan pada sifat individual sebagai aktor sosial yang memahami perilaku sesuai dengan posisi mereka dalam masyarakat.²⁴

Taliziduhu (2000) menyatakan bahwa peran sering diartikan sebagai elemen dinamis dari suatu lembaga, atau sebagai representasi tata institusional dari suatu lembaga, khususnya pemerintahan. Setiap peran mencerminkan suatu lembaga secara keseluruhan, namun beberapa di antaranya secara simbolis dianggap mewakili lembaga tersebut secara menyeluruh. Jenis peran ini memiliki signifikansi strategis dalam masyarakat, karena tidak hanya mencerminkan lembaganya sendiri tetapi juga berfungsi sebagai faktor integratif antar lembaga.

Peran merupakan konsep perilaku yang dapat dijalankan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Ini juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki peran penting dalam struktur sosial

²²*Ibid.* Hal 18

²³*Ibid.* Hal 18

²⁴Lidya Agustina, *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*, Jurnal Akuntansi Vol.1 No.1 Mei 2009, Hlm. 40-69.

masyarakat. Menurut Levinson (1983) dalam Soekanto (2001), syarat-syarat peran mencakup tiga aspek krusial, yakni peran melibatkan norma-norma terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran merupakan kumpulan peraturan yang memandu individu dalam kehidupan bersosial. Peranan pemerintah Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong merujuk pada tindakan yang dilakukan sesuai dengan status, kedudukan, dan kewenangan pemerintah Gampong.

Secara teoritis, terdapat beberapa peran yang bisa dijalankan oleh pemerintah Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Wasistiono (2001) menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai penyedia layanan umum, agen pembangunan, dan pelindung masyarakat. Peran pelayanan umum mencakup upaya pemerintah untuk menyediakan layanan jasa kepada masyarakat Gampong sesuai dengan kewenangannya. Sementara peran pembangunan melibatkan pelaksanaan program pembangunan di Gampong, termasuk program yang berasal dari pemerintah pusat atau yang dirancang oleh pemerintah Gampong sendiri. Peran perlindungan masyarakat adalah upaya pemerintah untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan peranan pemerintah dalam perekonomian masyarakat yaitu:

1) Peran Enterpreneur

Peran Enterpreneur sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi

atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan- tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

2) Peran Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

3) Peran Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

4) Peran Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

Dalam ekonomi modern, pemerintah memiliki empat kelompok peran yang dapat dipilih dan dianalisis sebagai stabilisator, yaitu:²⁵

- 1) Peran alokatif mencakup tugas pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal, sehingga dapat mendukung efisiensi produksi.
- 2) Peran distributif melibatkan keterlibatan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kesempatan dan hasil ekonomi dengan adil dan proporsional.
- 3) Peran stabilisatif mencakup tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dan memulihkannya ketika mengalami ketidakseimbangan.
- 4) Peran dinamisatif mencakup tugas pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ekonomi secara lebih cepat.

Berdasarkan teori peran yang telah disajikan maka peneliti akan fokus pada peran pemerintah gampong yang meliputi:

1. Peran pelayanan umum.
2. Peran pembangunan.
3. Peran perlindungan.

2. Peran Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan melibatkan memberikan kewenangan, delegasi wewenang, atau memberikan otonomi kepada tingkat hierarki yang lebih rendah.²⁶ Inti dari pemberdayaan adalah merangsang semua potensi yang ada guna mencapai tujuan,

²⁵ Kuncoro, Mudrajad. Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. (Jakarta: Erlangga, 2004). Hlm. 26.

²⁶ Widjaja, Haw. Otonomi Daeran dan Daerah Otonom. P.T Raja Grafindo Persada, 2011: Jakarta. Hlm. 40.

dengan menciptakan motivasi, inisiatif, kreativitas, serta memberikan penghargaan dan pengakuan kepada yang berprestasi dalam pencapaian tujuan tersebut. Awang (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan melibatkan pemberian kekuasaan, transfer kekuatan, atau delegasi otoritas kepada pihak lain, serta memberikan kemampuan dan keberdayaan. Pemberdayaan merupakan usaha untuk mengaktifkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan sosial, kebangsaan dan negara.²⁷

Pemberdayaan merupakan bagian dari pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada segala aspek penting manusia dalam lingkungannya, mencakup dari aspek intelektual (sumber daya manusia) hingga aspek material, fisik, dan manajerial.²⁸ Oleh karena itu, pemberdayaan adalah suatu langkah menuju peningkatan kekuatan, keterampilan, dan pembentukan kemandirian masyarakat, memungkinkan potensi masyarakat berkembang dan bersaing secara efektif dengan dunia luar.

Pemerintah terus berupaya memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian dan pembangunan, khususnya di tingkat desa. Untuk memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan potensinya, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima, tetapi juga perlu terlibat aktif serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, sehingga kemandirian masyarakat dapat tercapai.²⁹

²⁷ Soemantri, Bambang Trisantoso. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokusmedia, 2011: Bandung. Hlm. 102.

²⁸ Rahayu, Budiana. Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa, MG, 2008: Semarang. Hlm. 78.

²⁹ Awang, Azam. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Pustaka Pelajar, 2010: Yogyakarta. Hlm. 21.

Misi dari Program Pemberdayaan Desa adalah mempercepat upaya mengatasi kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat, melalui alokasi Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk mencapai kemandirian desa. Program Pemberdayaan Desa secara aktif menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, menunjukkan tekad Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan lebih banyak peluang kepada orang miskin dalam kegiatan ekonomi yang produktif.³⁰

3. Konsep Kelembagaan

Veblen (1899) mengatakan bahwa kelembagaan merupakan sekelompok norma dan kondisi ideal yang terus direproduksi melalui kebiasaan setiap generasi individu berikutnya, meskipun dengan tingkat kesempurnaan yang berbeda.³¹ Oleh karena itu, kelembagaan berfungsi sebagai pendorong dan pedoman bagi perilaku individu. Dalam konteks ini, keinginan individu (preferensi individu) bukanlah faktor utama dalam pengambilan keputusan, sehingga pada titik ini, tidak ada landasan untuk membangun suatu teori.

Kelembagaan berasal dari istilah lembaga yang merujuk pada aturan dalam suatu organisasi atau kelompok masyarakat yang membantu anggotanya berinteraksi demi mencapai tujuan yang diinginkan.³² Pandangan ahli kelembagaan menyatakan bahwa variasi perilaku manusia ditentukan oleh struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir dalam masyarakat karena masyarakat diatur oleh berbagai aturan. Untuk mengelola perilaku manusia, kelembagaan berfungsi

³⁰ Adisasmita, Rahardjo. Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu, 2011: Yogyakarta.. Hlm. 19

³¹ Ahmad Erani Yustika. Ekonomi Kelembagaan, Paradigma, Teori dan Kebijakan, 2013. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 43.

³² Ruttan VW, and Hayami Y. 1984. Toward a theory of induced institutional innovation. Journal of Development Studies. Vol 20: 22-203.

sebagai media atau wadah yang membentuk pola-pola dengan kekuatan dan aktivitas tetap, untuk memenuhi kebutuhan melalui pola yang ada dalam kelembagaan. Dengan adanya kelembagaan yang dirancang untuk mengatur pola perilaku dan memenuhi kebutuhan manusia, keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi positif pada kehidupan masyarakat.

Entitas yang dimaksud dalam pemerintahan ini adalah struktur kelembagaan di Gampong Pasir, Kecamatan Kluet, Aceh Selatan, yang mencakup aturan-aturan yang berlaku. Gampong Kluet memiliki peraturan yang mengatur tata kelola, administrasi, dan kebijakan lokal. Kepala gampong atau pemerintah gampong bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan kegiatan-kegiatan ini, dengan dukungan dari pegawai atau pekerja yang merupakan bagian dari pemerintah gampong. Pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan anggaran gampong tersebut. Terlebih lagi, kelembagaan masyarakat mencakup lembaga adat atau organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pengambilan keputusan dan tata kelola.

C. Pemerintah Gampong

Sejak diterapkan otonomi daerah, istilah "gampong" dapat disesuaikan dengan nama lain, seperti yang terjadi di Aceh dengan sebutan "Gampong." Begitu pula, semua istilah dan lembaga di Gampong dapat diubah sesuai dengan karakteristik tradisi dan adat istiadat setempat. Tindakan ini merupakan bentuk penghargaan Pemerintah terhadap sejarah dan tradisi lokal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dijelaskan bahwa gampong adalah unit masyarakat hukum di bawah mukim, yang dipilih

oleh keuchik atau pemimpin setempat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.³³

Pemerintah gampong adalah instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab mengurus wilayah di tingkat Gampong. Keberadaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan gampong, yang diterbitkan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 216 ayat (1). Kepala Gampong, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), memiliki tugas mengelola aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.³⁴

Pemerintah Gampong merupakan tingkatan pemerintahan terendah yang dipimpin oleh kepala Gampong atau lurah, bertanggung jawab atas urusan rumah tangga sendiri. Struktur pemerintahan gampong terdiri dari kepala Gampong dan lembaga musyawarah gampong, yang bersama-sama membentuk entitas penyelenggara pemerintahan gampong. Pemerintah Gampong merupakan lembaga pemerintahan tingkat terendah yang dipimpin oleh kepala Gampong atau lurah, bertugas mengatur urusan rumah tangga sendiri, dan terdiri dari kepala Gampong dan lembaga musyawarah gampong. Pemerintah gampong melibatkan kepala gampong dan perangkat gampong sebagai elemen penyelenggara pemerintahan gampong.³⁵

Pemerintah gampong memiliki peran dalam mengatur dan melaksanakan pemerintahan di gampong, di mana kepala gampong atau kades bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua kegiatan di gampong tersebut. Pemerintah

³³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

³⁴ Bayu Suryanigrat. *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta: Aksara Baru, 1970). Hlm. 35.

³⁵ *Ibid.*

gampong merupakan aspek pelaksanaan pemerintahan yang berada di tingkat terendah, langsung di bawah camat, mencakup pemerintahan gampong dan pemerintahan kelurahan. Sebuah Gampong perlu memiliki beberapa elemen, termasuk wilayah, penduduk, dan pemerintahan gampong. Elemen-elemen ini perlu didukung oleh fasilitas yang memadai bagi Gampong tersebut. Untuk melaksanakan tugas tersebut pemerintah Gampong mempunyai fungsi yaitu:³⁶

1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dari anggota masyarakat.
3. Membina kerukunan, ketentraman dan ketertiban bagi seluruh anggota masyarakat.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

Pemerintahan Gampong bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aspek politik dan pembangunan secara keseluruhan.³⁷

1. Struktur Organisasi Pemerintah Gampong

Susunan organisasi pemerintah Gampong adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas dalam pemerintahan Gampong akan memudahkan pelaksanaan tugasnya. Untuk menjalankan tugasnya, pemerintahan Gampong memerlukan kinerja yang terdefinisi dengan baik. Dengan memiliki struktur organisasi, pemerintah

³⁶ *Ibid.*

³⁷ H.A.W. *Pemerintah Desa/Marga*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 65.

Gampong dapat lebih mudah menjalankan peran dan fungsinya, sehingga meningkatkan kualitas pelayanannya. Dalam pelaksanaan suatu pemerintahan gampong disebutkan bahwa struktur pemerintah gampong meliputi:

- a. Pemerintah gampong terdiri dari kepala gampong dan perangkat gampong. Perangkat Gampong terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.
- b. Struktur pemerintahan gampong ini adalah merupakan lampiran peraturan daerah dan merupakan satu kesatuan dengan peraturan daerah tersebut. Peraturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Pemerintah gampong ditetapkan dalam keputusan Bupati.

2. Tugas Pemerintah Gampong

Pemerintah gampong menyelenggarakan unsur-unsur fungsi pemerintahan umum sebagai bagian dari tugas utamanya, bersama dengan fungsi lainnya, untuk memenuhi tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya.³⁸

a. Tugas Kepala Gampong

Tugas dan kewajiban kepala gampong adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- 2) Membina kehidupan masyarakat gampong.
- 3) Membina perekonomian gampong.
- 4) Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat gampong.
- 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong.
- 6) Mewakili Gampong di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum.

³⁸ H.A.W. *Pemerintah Desa/Marga*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 65.

b. Tugas Aparatur Pemerintah Gampong.

Aparatur pemerintah gampong bertugas membantu kepala gampong, aparatur pemerintah gampong terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut:

- 1) Unsur staf memberikan pelayanan administrasi.
- 2) Unsur pelaksana merupakan pelaksana teknis di lapangan.
- 3) Unsur wilayah membantu kepala gampong di wilayah bagian gampong yang disebut kepala lingkungan.

c. Tata Kerja

Kepala gampong dan perangkat gampong harus berkoordinasi, mengintegrasikan, dan menyinkronkan tugas mereka dengan lingkungan sekitar dan organisasi lain sesuai dengan peran masing-masing. Struktur dan fungsi pemerintahan gampong diharapkan dapat memberikan pelayanan dan memenuhi tugas serta kewajiban sebagai pelayan masyarakat dan negara. Agar terjadi koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, aparatur gampong dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Kontrol terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh aparatur gampong dapat dilakukan oleh lembaga pemerintahan gampong dan masyarakat setempat.

Individu memiliki peran dinamis sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di pemerintahan daerah. Oleh karena itu, faktor kunci untuk mewujudkan otonomi daerah adalah peran manusia. Manusia sebagai pelaksana pemerintahan dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok masing-masing adalah:

- 1) Pemerintah daerah terdiri kepada daerah.
- 2) Alat-alat pelengkap terdiri dari aparatur.
- 3) Rakyat biasa.

Komponen-komponen tersebut memiliki peranan krusial dalam membentuk pemerintahan daerah yang tangguh dan efisien dalam mengembangkan daerahnya. Melalui pemberian otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menunjukkan kemampuannya dalam menangani urusan pemerintah lokal sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintahan yang akan datang adalah pemerintahan yang cerdas, mampu mengubah kebijakan publik menjadi langkah-langkah operasional yang inovatif dan kreatif, dengan fokus pada kepentingan masyarakat.

Pemerintahan yang cerdas dapat tercapai melalui kecerdasan aparaturnya. Peningkatan sumber daya manusia dalam aparatur pemerintah daerah melibatkan peningkatan kualitas aparaturnya, dimulai dari tahap rekrutmen dengan sistem yang memastikan pilihan sumber daya manusia berkualitas. Proses pembinaan melibatkan penugasan yang mendidik, program pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap, peningkatan kesejahteraan, dan jaminan hari tua yang konkret.³⁹

D. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kepuasan yang didapat seseorang dari pendapatannya, namun tingkat kesejahteraan relatif karena bergantung pada sejauh mana kepuasan diperoleh dari konsumsi pendapatan. Hubungan antara

³⁹ Josep Riwu Kaho. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: CV.Rajawali, 1991). Hlm. 25.

kesejahteraan dan kebutuhan terjadi ketika kebutuhan terpenuhi, menandakan seseorang dinilai sejahtera karena kebutuhan tersebut sejalan dengan indikator kesejahteraan.⁴⁰

Kesejahteraan adalah keadaan kehidupan individu dan masyarakat yang memenuhi standar hidup yang diakui oleh masyarakat. Kesejahteraan melibatkan kepuasan yang berasal dari konsumsi pendapatan, namun tingkatnya bersifat relatif karena tergantung pada seberapa besar kepuasan yang diperoleh dari pendapatan tersebut. Kesejahteraan adalah suatu sistem kehidupan dan sosial yang mencakup aspek material, spiritual, dan sosial, dengan rasa aman, moralitas, dan ketenangan batin. Ini memungkinkan setiap warga negara untuk berusaha memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial secara optimal bagi diri, keluarga, dan masyarakat.⁴¹

Peningkatan kesejahteraan sosial/masyarakat harus berfokus pada tiga aspek, yakni pelayanan sosial/masyarakat, perlindungan sosial/masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa peran yang diperlukan untuk pembangunan kesejahteraan sosial/masyarakat tersebut antara lain adalah:⁴²

- 1) Peranan sebagai fasilitator;
- 2) Peranan sebagai mediator;
- 3) Peranan sebagai pembela; dan
- 4) Peranan sebagai pelindung.

⁴⁰ Mario Juan C.S. Hidete, Arie J. Rorong, Novie. R. A. Palar. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawe Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. *JAP*. No. 114. Vol. VIII, 2022. Hlm. 40.

⁴¹ Swasono, Sri Edi. *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*. (Yogyakarta: Pustep UGM, 2004). Hlm. 43.

⁴² Suharto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: Refika Aditama, 2009). Hlm. 15.

Terdapat tiga peran krusial pemerintah dalam upaya menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan umum, peran pembangunan/pemberdayaan, dan peran perlindungan. Sesuai dengan tugas dan kewenangan pemerintah Gampong, pemerintah setempat dapat menjalankan berbagai peran guna mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa peran kunci pemerintah Gampong dalam mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang akan diteliti melibatkan peran pelayanan umum, peran pembangunan, dan peran perlindungan masyarakat. Melalui pelaksanaan peran pelayanan oleh pemerintah Gampong, dapat tercapai atau ditingkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.⁴³

Kesejahteraan masyarakat dapat dinilai melalui berbagai indikator kesejahteraan sebagai ukuran pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, menunjukkan apakah masyarakat tersebut dapat dianggap sejahtera atau tidak. Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa instansi pemerintah, antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Berdasarkan Bappenas, kesejahteraan dapat dinilai dengan mengukur proporsi pengeluaran rumah tangga. Sebuah rumah tangga dianggap sejahtera jika proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok setara atau lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non-pokok.
2. Kriteria untuk menentukan status rumah tangga miskin melibatkan: (a) luas bangunan per anggota keluarga kurang dari 8 meter persegi; (b) lantai

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Muhammad Ramli. *Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan*, 2008. Hlm.

terbuat dari tanah/papan dengan kualitas rendah; (c) dinding rumah menggunakan bamboo/papan dengan kualitas rendah; (d) tidak tersedianya fasilitas MCK; (e) sumber air minum bukan air bersih; (f) penerangan yang digunakan bukan listrik; (g) bahan bakar memasak adalah kayu; (h) frekuensi makan kurang dari dua kali sehari; (i) ketidakmampuan membeli daging/susu/ayam dalam seminggu.⁴⁵



⁴⁵ Muhammad Daud, yushita Marini, *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*, Jurnal Humaniora Volume 2, No. 1, April 2018: Hlm. 29-38.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif, khususnya melalui metode deskriptif kualitatif. Metode ini melibatkan langkah-langkah sistematis seperti pengumpulan data, observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen.⁴⁶ Studi ini bertujuan memberikan gambaran tentang kontribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan. Fokus penelitian mencakup peran pemerintah, dampak program-program yang diterapkan, dan inisiatif yang mendorong minat peneliti untuk menyelidiki topik tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet, Kabupaten Aceh Selatan, yang menjadi lokasi penelitian ini, karna dari hasil wawancara dengan masyarakat ditemukan berbagai informasi lapangan yang mengindikasikan permasalahan terhadap program-program yang diberikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Gampong Ujung Pasir, dan penelitian ini bertujuan untuk melihat dari segi upaya pemerintah dalam memberikan dan meningkatkan kesejahteraan serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat Gampong Ujung Pasir.

⁴⁶ Wayan Suwendra, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, (Bandung: NILACAKRA, 2018). Hlm. 4-6.

C. Teknik Pemilahan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan penilaian bahwa mereka memiliki pemahaman dan informasi mendalam mengenai permasalahan, serta dianggap mampu memberikan wawasan yang komprehensif terkait fenomena yang relevan dengan masalah penelitian.⁴⁷ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Keuchik	1	<i>Key Informan</i>
2.	Sekretaris	1	<i>Key Informan</i>
3.	Bendahara	1	<i>Key Informan</i>
4.	Kasie Pemerintah	1	<i>Key Informan</i>
5.	Kasie Kesejahteraan	1	<i>Key Informan</i>
6.	Anggota Masyarakat	5	Informan Utama
Total		10	-

Berdasarkan informan dalam penelitian ini yaitu individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan pada objek penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan seperti keuchik yaitu informan yang mempunyai kewenangan terhadap pemerintah gampong begitu juga sekretaris gampong, bendahara gampong, kasie pemerintah gampong, kasie kesejahteraan gampong hingga ke masyarakat yang merasakan peran dari pemerintah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan.

⁴⁷Deddy Mulyana, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). Hlm. 183.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan selama proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada 3 cara yang digunakan oleh peneliti dalam Teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dianggap sebagai data primer karena mampu menghasilkan informasi langsung dari sumber data atau objek penelitian yang diamati di lapangan. Dalam wawancara, peneliti berdiskusi dengan informan untuk memperoleh informasi, dan teknik pengumpulan data ini menjadi metode penting untuk melengkapi informasi, memiliki signifikansi yang setara dengan observasi.⁴⁸

2. Observasi

Observasi merupakan teknik yang memerlukan peneliti untuk melakukan pengamatan secara sengaja, sistematis, terencana, dan dengan tujuan yang jelas di lokasi penelitian yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Hal ini mempermudah peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan.⁴⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan informasi nonbehavioral, khususnya data dokumen. Metode ini mencakup pencatatan

⁴⁸Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014). Hlm. 25.

⁴⁹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung: Refika Adimata, 2012). Hlm. 208.

sistematis gejala-gejala yang terdapat pada dokumen, yang bisa berupa tulisan, gambar, atau objek lainnya.⁵⁰

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pandangan Bogdan dan Biklen (1982), analisis data adalah suatu proses sistematis di mana transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, foto, dan materi lainnya dicari dan diatur secara terstruktur. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan, memungkinkan temuan penelitian disajikan dan disampaikan kepada orang lain.⁵¹

Analisis data, yang melibatkan seluruh dataset secara kontinu, dilakukan melalui tiga tahapan aktivitas dengan merujuk pada pertanyaan penelitian, diantaranya dengan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dan verifikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Wawancara dilakukan dengan sumber informasi yang mampu memberikan informasi akurat terkait studi kasus penelitian.

⁵⁰Soebardhy, Muchlas Samani, Dkk, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan, Jawa Timur : Qiara Media, 2020). Hlm. 128.

⁵¹Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Hlm. 64.

2. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan merangkum informasi, memilih aspek-aspek kunci, fokus pada elemen yang signifikan, menemukan tema dan pola, serta menghilangkan yang tidak diperlukan.⁵²

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ditarik sebagai evolusi temuan dari data hasil interview, observasi, dan studi dokumentasi. Kesimpulan ini merupakan interpretasi peneliti yang dikoreksi dengan pemikiran narasumber, didukung oleh bukti yang valid, konsisten, dan kredibel.⁵³

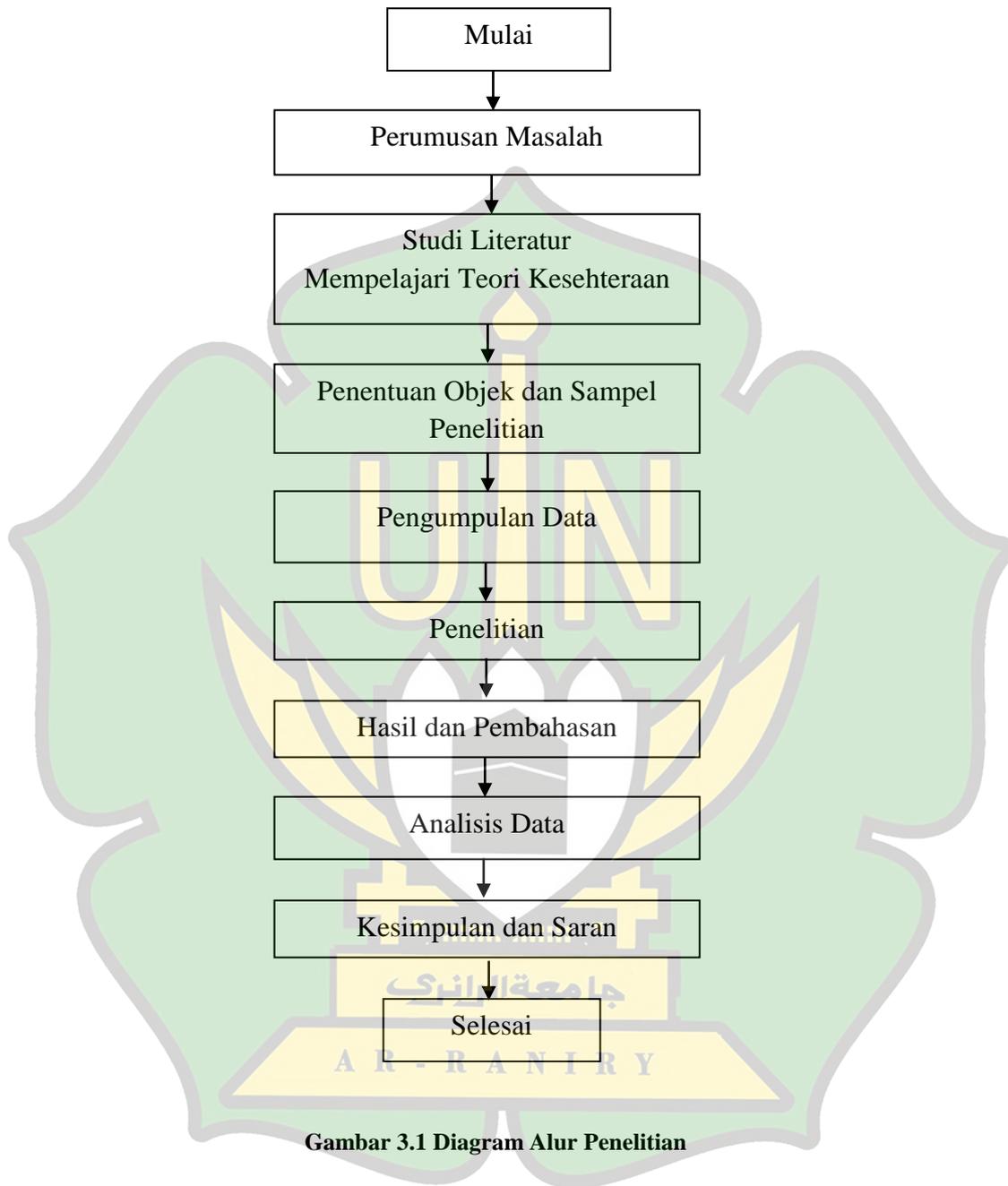


⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: AFABETA, CV: 2011). Hlm. 21.

⁵³*Ibid.*

F. Diagram Alur Penelitian

Diagram alur penelitian Skripsi ini ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Penelitian

1. Sejarah Gampong

Gampong Ujung Pasir adalah salah satu gampong yang berada di pemukiman Kandang yang letaknya dilintasan jalan Kecamatan Kluet Utara. Gampong Ujung Pasir awalnya terdiri dari satu dusun namun karena perkembangan dan penambahan penduduk Gampong Ujung pasir sekarang terdiri dari tiga dusun. Penduduk Gampong Ujung Pasir hidup di sektor pertanian, nelayan, pedagang, PNS dan sebagian disektor pertukangan.

Gampong Ujung Pasir merupakan salah satu gampong yang terdiri pada tahun 1953 hasil dari pemekaran dari Gampong Pasir Merapa. Awal mula berdirinya Gampong Ujung Pasir akibat terjadinya banjir besar yang megakibatkan pecahnya Gampong Pasir Merapat dengan Gampong Ujung Pasir. Gampong Ujung Pasir hanya memiliki fasilitas dan ketika sholat idul fitri masyarakat Gampong Ujung Pasir harus pergi ke Gampong Pasir Merapat untuk sholat bersama, untuk sampai ke Gampong Pasir Merapat masyarakat harus melewati sungai besar dan harus naik sampan (perahu kecil) untuk sampai ke Gampong Pasir Merapat. Wilayah Gampong Ujung Pasir sebagian di penuhi oleh pohon Rumbia.⁵⁴

Letak geografis Gampong Ujung Pasir merupakan salah satu Gampong yang terletak di pemukiman Kandang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak 3,50 Km dari pusat Kecamatan. Luas wilayah Gampong

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kecik Gampong Ujung Pasir, Samsul Kamar, Pada tanggal

Ujung Pasir adalah sekitar 75 Ha, yang terbagi dalam tiga dusun yaitu Dusun Cempaka, Dusun Mawar, dan Dusun Pasar Baru dengan jumlah penduduk 359 jiwa, mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan berkebun, petani sawah diluar Gampong, sebagai buruh tidak tetap, pedagang dan pegawai kantor pemerintahan.

Letak geografis Gampong Ujung Pasir, sebelah utara Simpang Empat Kelut Utara, sebelah timur simpang Empat Kelut Utara, sebelah selatan pasi Badari Kluet Selatan. Sementara itu Gampong Ujung Pasir terbagi menjadi 3 Jorong yaitu, Jorong Cempaka, Jorong Pasar Baru, Jorong Mawar. Gampong Ujung Pasir merupakan satu kesatuan wilayah Gampong yang terdiri dari 3 (dusun) yang di pimpin oleh kheucik bernama bapak Samsul Kamar. Gampong Ujung Pasir terletak dibagain pedalaman tidak jauh dari jangkauan masyarakat luas, Gampong Ujung Pasir tepatnya dekat dengan Gampong Simpang Empat Kota Fajar, masyarakat ujung pasir ada umumnya bekerja sebagai buruh tani, nelayan, pegawai swasta dan pedagang.⁵⁵

Penduduk Gampong Ujung Pasir adalah sebanyak 78 KK dan jumlah KK Perdusun di Gampong Ujung Pasir dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Juron/Dusun

No.	Jurong/ Dusun	Jumlah KK	Jenis kelamin		Jumlah jiwa
			Lk	Pr	
1.	Pasar Baru	27	57	76	133
2.	Cempaka	27	54	66	120
3.	Mawar	24	48	58	106
Total		78	159	200	359

Sumber: Kechik Ujung Pasir tahun 2023

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Pak Samsul Kamar, Gecik Gampong Ujung Pasi, pada tanggal

2. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan terletak antara 3 0 55' 23" – 4 0 16' 37" Lintang Utara dan 96 0 43' 23" – 98 0 10' 32" Bujur Timur dengan topografi yang bervariasi. Gampong Ujung Pasir merupakan salah satu Gampong di kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dengan memiliki luas wilayah ±1,907 Ha. Batas wilayah Gampong Ujung Pasir antara lain:

Sebelah Utara	: Hutan Lindung
Sebelah Selatan	: Pantai/Samudra Hindia
Sebelah Timur	: Gampong Panjupian
Sebelah Barat	: Gampong Lhok Bengkuang Timur

Secara Geografis dan secara administratif gampong Ujung Pasir merupakan salah satu dari 17 Gampong di Kecamatan Kluet Selatan yang tergabung diantara 260 Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan. Gampong yang memiliki luas wilayah +75 Ha secara topografis terletak pada ketinggian 1 sampai 2 meter diatas permukaan air laut jarak Gampong Ujung Pasir dengan Ibu Kota Kecamatan skitar ±5 km sedangkan jarak ke Kabupaten ±35 km.⁵⁶

3. Visi Misi

Adapun visi dan misi gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan adalah:

- Kesejahteraan masyarakat.
- Gratis PBB.
- Peningkatan majelis taqlim.

⁵⁶ Profil Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet, Kabupaten Aceh Selatan.

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Ujung Pasir



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

(Sumber: Profil Gampong, 2023)

5. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Gampong Ujung Pasir

a. Kepala Gampong

1. Menyelenggarakan Pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan gampong.
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan gampong mengenai APB Gampong untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat gampong.
6. Membina ekonomi gampong.
7. Mengordinasikan pembangunan Gampong secara partisipatif.

8. Mewakili Gampongnya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

b. Sekretaris Gampong

1. Tugas Pokok: Membantu Kepala Gampong dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Gampong, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

2. Fungsi:

- a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Gampong.
- b. Melaksanakan tugas kepala Gampong dalam hal kepala Gampong berhalangan.
- c. Melaksanakan tugas kepala Gampong apabila kepala Gampong diberhentikan sementara.
- d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Gampong.
- e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Gampong.

c. Kepala Urusan (Kaur) Umum

1. Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Gampong dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Gampong, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

2. Fungsi:

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
- b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Gampong.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
- d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- e. Pengelolaan administrasi perangkat Gampong.
- f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Gampong.

d. Kaur Keuangan

1. Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Gampong dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Gampong, pengelolaan administrasi keuangan Gampong dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Gampong.

2. Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Gampong.
- b. Persiapan bahan penyusunan APB Gampong; dan

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Gampong.

e. Kasi Pemerintahan

1. Tugas Pokok: Membantu Kepala Gampong dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Gampong.

2. Fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Gampong dan keputusan Kepala Gampong.
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
- d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Gampong.
- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
- f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Gampong.

f. Kasi Kesejahteraan

1. Tugas Pokok: Membantu Kepala dGampong dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program

keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

2. Fungsi:

- a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
- b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Gampong.

6. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan kondisi Gampong Ujung Pasir baik dari sarana formal maupun non formal meliputi Masjid Gampong, Balai Pengajian/TPA, Kantor Keuchik, Tempat PKK, Tempat Posyandu, Gedung Serbaguna, Rumah Sekolah PAUD, Lapangan Volly. Pembangunan sarana prasarana yang dilakukan dengan menggunakan dana Gampong oleh Gampong Ujung Pasir yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sarana Formal dan Non Formal

No.	Saran Formal	Saran Non Formal
1.	Masjid Gampong	Tempat PKK
2.	Balai Pengajian/TPA	Tempat Posyandu
3.	Kantor Keuchik	Lapangan Voly
4.	Rumah Sekolah PAUD	Gadung Serbaguna

Sumber: Keuchik Ujung Pasir Tahun 2023

Selanjutnya kondisi fisik Gampong dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Kondisi Pengguna tanah

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1.	Area Pusat Gampong	5 Ha
2.	Area Pemukiman Penduduk	25 Ha
3.	Area Pertanian	7 Ha
4.	Area Perkebunan	15 Ha
5.	Area Pendidikan	0,5 Ha
6.	Area industri	-
7.	Area Perkebunan	-
8.	Area perdagangan	-
9.	Area pusat pelayana kesehatan	0,5 Ha
10.	Area rekreasi dan olah raga	0,5 Ha
11.	Area tambak dan rawa	10 Ha
12.	Saluran irigasai	-
13.	Jalan atau lorong	17 Ha
14.	Jembatan atau gorong-gorong	9 Ha

Sumber: *kecik ujung pasir thun 2022*

Mata pencarian penduduk Gampong Ujung Pasir banyak bergerak dibidang buruh tani, pegawai swasta, pedangan dan nelayan bisa dilihat dari Tabel 4.4 dibawah:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Petani	40	Masih aktif
2.	Pedagang	6	Masih aktif
3.	Peternak	65	Masih aktif

4.	Pertukangan	6	Masih aktif
5.	Sopir	7	Masih aktif
6.	Pekerja bengkel	1	Masih aktif
7.	Pengrajin/rumah tangga	65	Masih aktif
8.	Wiraswasta	-	Masih aktif
9.	PNS/TNI/POLRI	2	Masih aktif
10.	Lainnya	-	-
Jumlah		192	-

Sumber: *kecik Gampong Ujung Pasir Tahun 2022*

Gampong Ujung Pasir memiliki berbagai bentuk sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat setempat, selain memiliki pekerjaan di sektor pertanian, pedagang dan pegawai swasta. Berdasarkan hal ini bahwa masyarakat Gampong Ujung Pasir tidak hanya berpatokan kepada bidang pekerjaannya, Gampong Ujung Pasir juga memiliki sumber daya alam yang bisa dikelola oleh masyarakat setempat untuk menambah penghasilan dan mensejahterakan kehidupan. Gampong Ujung Pasir juga tedapat begitu banyak pohon sagu, pohon sagu digunakan oleh masyarakat sebagai penambah pemasukan, daun nya bisa dianyam dan di jadikan atap, kemudian dijual untuk memperoleh keuangan dan batang dari pohon sagu diolah menjadi sagu kemudian dijual.

B. Hasil Penelitian

1. Peranan Pemerintah Gampong Ujung Pasir Dalam Mensejahterahkan Masyarakat Gampong

Pemimpin tertinggi di gampong adalah kepala gampong, yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemerintahan dan peran signifikan dalam pembangunan gampong. Konsep pembangunan ekonomi saat ini, yang mencakup nilai-nilai sosial, diimplementasikan melalui pemberdayaan atau kesejahteraan

masyarakat. Di gampong Ujung Pasir, terdapat beragam program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, baik melalui pembangunan fisik maupun non-fisik gampong.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa program yang dilakukan pemerintah yaitu:

1. Program pembangunan daerah seperti dengan adanya pembangunan jalan.
2. Program pemberdayaan perempuan.
3. Program pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian seperti pembagian atau pemberian bantuan bibit tanaman.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam sektor peternakan seperti pembagian atau pemberian bantuan bibit ternak.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam sektor kesehatan seperti dalam pembangunan rumah untuk berobat.

Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan dari wawancara dengan Kepala Gampong Ujung Pasir, Bapak Samsul Kamar, yang menyatakan bahwa:

“Program pemberdayaan masyarakat di gampong mencakup aspek fisik, seperti perbaikan talut/irigasi persawahan, jalan kampung, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, terdapat juga program pemberdayaan non-fisik, seperti pengembangan sektor pertanian dan peternakan, perkebunan, peningkatan kapasitas aparatur gampong, serta pemberdayaan perempuan dan berbagai inisiatif lainnya”.⁵⁷

Berdasarkan itu, pemberdayaan masyarakat di Gampong merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembangunan Gampong. Pembangunan di Gampong memungkinkan implementasi berbagai program yang dapat memberdayakan masyarakat, seperti pembangunan irigasi untuk mendukung

⁵⁷ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Samsulkamar Pada 7 November 2023.

kehidupan masyarakat Gampong yang bergantung pada pertanian, khususnya bercocok tanam padi (sawah). Peran Keuchik dalam mengelola pemerintahan Gampong sangat beragam, termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat Gampong. Seiring dengan tugas dan kewenangannya dalam memberdayakan masyarakat Gampong, Keuchik perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi khusus Gampong tersebut.

Ini sejalan dengan pernyataan Bapak Suman Usaini, yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan, menyatakan bahwa:

“Ada berbagai program pemberdayaan masyarakat di gampong, namun terbatasnya sumber dana menyebabkan fokus saat ini hanya pada pemberdayaan pertanian dan peternakan, mengingat mayoritas penduduk di sini berkecimpung dalam sektor tersebut”.⁵⁸

Ibu Maria Surpita, yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, juga menyampaikan hal serupa bahwa:

“Sebagian besar warga di gampong ini mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak, dan saat ini program pemberdayaan hanya terfokus pada sektor pertanian dan peternakan”.⁵⁹

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Gampong, Bapak Ali Judan, yang menyatakan bahwa:

“Gampong ini sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian, Gampong Ujung Pasir didominasi oleh penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak. Saat ini, kendala dana menyebabkan fokus program pemberdayaan di gampong ini terbatas pada sektor pertanian dan peternakan”.⁶⁰

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bendahara Gampong Ujung Pasir, Bapak Edy Asmawar, yang menyatakan bahwa:

“Mayoritas penduduk di gampong ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan peternakan, namun saat ini terbatasnya dana menyebabkan

⁵⁸ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 8 November 2023

⁵⁹ Hasil Wawancara Terhadap Ibu Maria Surpita Pada 9 November 2023

⁶⁰ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Ali Judan Pada 9 November 2023

program pemberdayaan hanya fokus pada sektor tersebut. Selain itu, nilai ekonomi dari pertanian dan peternakan dianggap tinggi”.⁶¹

Program pemberdayaan masyarakat di gampong ini mencakup sektor pertanian dan peternakan, perkebunan, peningkatan kapasitas aparatur gampong, pemberdayaan perempuan, dan inisiatif lainnya. Hampir seluruh penduduk di gampong ini mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak. Menerapkan pendekatan partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan Gampong adalah langkah yang tepat dan sesuai untuk mewujudkan demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan Gampong. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Gampong mencerminkan ekspresi dari kepedulian, kesiapan, dan kemauan mereka untuk berkontribusi serta terlibat aktif dalam pelaksanaan program-program di wilayah mereka. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendukung kemandirian daerah, sehingga dengan dukungan penuh dari warga, pelaksanaan pembangunan Gampong dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa program yang dilakukan pemerintah yaitu:

1. Program pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian seperti pembagian atau pemberian bantuan bibit tanaman.
2. Program pemberdayaan masyarakat dalam sektor peternakan seperti pembagian atau pemberian bantuan bibit ternak.
3. Program peningkatan kapasitas aparatur gampong.
4. Program pemberdayaan perempuan.

Partisipasi masyarakat sangat krusial untuk mendukung implementasi otonomi daerah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat harus diwujudkan

⁶¹ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Edy Asmawar Pada 9 November 2023

melalui pemberian kewenangan kepada mereka, terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Undang-undang telah mengatur mengenai bentuk dan prosedur keterlibatan masyarakat Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, khususnya dalam konteks pelaksanaan tugas oleh Keuchik/Kepala Gampong dalam memberdayakan masyarakat.

Ini sejalan dengan temuan dari wawancara dengan Kepala Gampong Ujung Pasir, Bapak Samsul Kamar. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Ujung Pasir dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Tindakan yang saya lakukan dalam memberdayakan masyarakat melibatkan pemilihan sasaran pemberdayaan secara cermat, penetapan tujuan sesuai dengan permasalahan masyarakat, pengaturan aturan agar partisipasi masyarakat menjadi kewajiban dalam usaha pemberdayaan, dan melakukan evaluasi setiap program pemberdayaan masyarakat setelah dilaksanakan”.⁶²

Ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan, Bapak Suman Usaini, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat harus selektif dalam memilih target pemberdayaan agar prosesnya berjalan efektif. Ini melibatkan penetapan tujuan yang sesuai dengan permasalahan masyarakat, pengaturan aturan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan, dan melakukan evaluasi setiap program pemberdayaan masyarakat setelah selesai untuk mengevaluasi keberhasilannya”.⁶³

Dari pernyataan tersebut, tindakan Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melibatkan pemilihan target pemberdayaan dengan cermat, penetapan tujuan yang sesuai dengan masalah masyarakat, pengaturan aturan untuk mendorong partisipasi masyarakat, dan evaluasi setiap program pemberdayaan masyarakat setelah selesai. Pemerintah gampong berperan sebagai fasilitator dan

⁶² Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 7 November 2023

⁶³ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 8 November 2023

memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat mengenai tujuan pemberdayaan yang akan dijalankan.

Kepala gampong adalah pemimpin tertinggi di wilayah tersebut, dan sebagai konsekuensinya, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap roda pemerintahan di gampong. Selain peran kepemimpinan dalam pemerintahan, Kepala gampong juga memiliki peran krusial dalam proses pembangunan gampong. Kepala gampong adalah individu pertama yang memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas dan kewajiban, khususnya dalam mengelola dan menjadi penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan gampong. Tugasnya mencakup penyelenggaraan pemerintahan gampong, urusan pemerintahan umum, serta pembinaan, ketentraman, dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, menurut Kepala Gampong Ujung Pasir, Bapak Samsul Kamar, adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Gampong Ujung Pasir berperan dalam memberdayakan kelompok tani dengan menyediakan dana dan bantuan lainnya, memberikan motivasi melalui penyuluhan, menjadi fasilitator dengan menyediakan sarana pertanian seperti alat-alat pertanian, serta berfungsi sebagai pengawas yang memonitor kegiatan kelompok tani”.⁶⁴

Ini sejalan dengan pernyataan dari Kasi Kesejahteraan, Bapak Suman Usaini, yang menyatakan bahwa:

“Peran Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melibatkan peran sebagai motivator, yaitu menginspirasi partisipasi masyarakat ketika menghadapi hambatan dalam proses pemberdayaan pertanian. Pemerintah berupaya melalui pengembangan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat”.⁶⁵

⁶⁴ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 7 November 2023

⁶⁵ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 8 November 2023

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan, Ibu Maria Surpita, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah berperan dalam memberdayakan masyarakat dengan menyediakan bantuan sarana dan prasarana pertanian, serta menyelenggarakan pelatihan melalui penyuluhan. Tujuan dari inisiatif ini adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki kemampuan”.

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Sekretaris Gampong Ujung Pasir, Bapak Ali Judan, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah dalam memberdayakan terkadang memberikan dorongan semangat kepada masyarakat dan rekan petani hanya saat ada pelatihan atau kegiatan tertentu. Di sela-sela itu, pertemuan di warung seringkali menjadi momen untuk berbagi cerita, terutama terkait fluktuasi harga padi, perawatan yang memerlukan usaha ekstra, dan nasihat dari Pemerintah Gampong yang selalu mengajak untuk tetap sabar dan tidak putus asa. Meskipun demikian, kondisi kehidupan yang semakin berat, termasuk biaya sekolah anak dan kenaikan harga kebutuhan, membuat semangat masyarakat tetap tinggi dengan dorongan yang diberikan”.⁶⁶

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bendahara Gampong Ujung Pasir, Bapak Edy Asmawar, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Gampong Ujung Pasir berperan dalam memberdayakan kelompok tani melalui pemberian bantuan, fungsi sebagai motivator melalui penyuluhan kepada kelompok tani, menjadi fasilitator dengan menyediakan sarana dan prasarana pertanian seperti alat-alat pertanian, dan berperan sebagai pengawas yang mengawasi kegiatan kelompok tani”.⁶⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, peran Pemerintah Gampong Ujung Pasir dalam memberdayakan petani memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan sektor pertanian di gampong. Pemerintah gampong berperan sebagai fasilitator, penyedia informasi bagi kelompok tani, motivator, pengawas dan pelaksana dalam distribusi bantuan, serta sebagai pembimbing dan pengarah bagi para petani. Pemerintah gampong dan pemerintah daerah memberikan

⁶⁶ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

⁶⁷ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

dukungan pertanian berupa fasilitas dan bantuan kepada petani, termasuk penyediaan benih, pupuk, dan peralatan produksi lainnya. Di sektor peternakan, setiap anggota kelompok mendapatkan bibit ternak untuk dielola dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Di Gampong Ujung Pasir, terselenggarakan berbagai program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program tersebut mencakup sektor pertanian, peternakan, perkebunan, peningkatan kapasitas aparatur gampong, pemberdayaan perempuan, dan inisiatif lainnya. Hampir sebagian besar penduduk di gampong ini mayoritasnya bekerja sebagai petani dan peternak.

Terkait dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Samsul Kamar, yang menjabat sebagai Kepala Gampong Ujung Pasir, dan menyatakan bahwa:

“Dalam kelompok tani ini, Pemerintah memberikan bantuan subsidi berupa obat-obatan, pupuk, alat semprot, modal, dan penyediaan bibit unggul. Untuk peternak, Pemerintah memberikan bibit ternak seperti anak kambing. Bantuan ini sangat membantu masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, karena harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan pembelian bebas di pasaran. Penting dicatat bahwa pembagian bantuan ini dilakukan secara bergiliran dan tidak terus-menerus, bergantian dengan kelompok tani lainnya”.⁶⁸

Ini sejalan dengan pernyataan dari Kaur Pemberdayaan, Bapak Suman Usaini, yang menyatakan bahwa:

“Kelompok tani menerima bantuan subsidi dari Pemerintah, termasuk obat-obatan, pupuk, alat semprot, modal, dan penyediaan bibit unggul. Sementara itu, para peternak mendapatkan bibit ternak seperti anak kambing. Penting dicatat bahwa pembagian bantuan ini dilakukan secara bergiliran dan tidak kontinu, bergantian dengan kelompok tani lainnya”.⁶⁹

⁶⁸ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 7 November 2023

⁶⁹ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 8 November 2023

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Gampong Ujung Pasir, Ibu Maria Surpita, yang menyatakan bahwa

“Para peternak mendapatkan bantuan berupa bibit ternak seperti anak kambing, sementara kelompok tani menerima dukungan dari Pemerintah berupa pupuk, obat, alat semprot, modal, dan bibit”.

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Sekretaris Gampong Ujung Pasir, Bapak Ali Judan, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah memberikan bantuan kepada peternak berupa modal dan bibit ternak seperti anak kambing. Sementara itu, untuk kelompok tani, Pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk, obat, alat semprot, modal, dan bibit. Penting dicatat bahwa pembagian bantuan ini dilakukan secara bergiliran dan tidak terus-menerus, bergantian dengan kelompok tani lainnya”.⁷⁰

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bendahara Gampong Ujung Pasir, Bapak Edy Asmawar, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada kelompok tani, meliputi obat-obatan, pupuk, alat semprot, modal, dan penyediaan bibit unggul. Sementara itu, para peternak menerima bantuan berupa bibit ternak, seperti anak kambing”.⁷¹

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ibu PA, yang merupakan tokoh masyarakat, menyatakan bahwa:

“Kelompok tani yang saya ikuti pernah menerima bantuan dari Pemerintah, melibatkan obat-obatan, pupuk, alat semprot, bibit, dan modal untuk membeli keperluan lainnya”.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ibu SI, yang merupakan tokoh masyarakat, menyatakan bahwa:

“Saya sering kali menerima bantuan, termasuk pupuk dengan dua jenis, NPK dan Urea, bibit padi, alat semprot, dan juga mendapatkan modal. Syukur, hal ini telah membantu mengurangi biaya saya dalam kegiatan bertani”.

⁷⁰ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

⁷¹ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ibu MA, yang merupakan tokoh masyarakat, menyatakan bahwa:

“Kelompok tani saya di sini beberapa kali menerima bantuan berupa pupuk, bibit, alat semprot, atau peralatan pertanian lainnya, dan kami juga mendapatkan modal untuk mendukung usaha pertanian kami”.⁷²

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak SA, yang merupakan tokoh masyarakat, menyatakan bahwa:

“Saya sebagai anggota kelompok tani pernah menerima dukungan dari Pemerintah berupa obat-obatan, pupuk, alat semprot, bibit, dan juga modal untuk kebutuhan lainnya”.⁷³

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak UD, yang merupakan tokoh masyarakat, menyatakan bahwa:

“Saya sebagai anggota kelompok tani pernah menerima bantuan dari Pemerintah, melibatkan obat-obatan, pupuk, alat semprot, bibit, serta mendapatkan bibit ternak seperti kambing, dan juga modal untuk mendukung usaha saya”.⁷⁴

Pemerintah melakukan sejumlah langkah dalam pemberdayaan masyarakat, yang pertama adalah pemilihan masyarakat yang tepat sebagai sasaran pemberdayaan. Pemerintah menetapkan tujuan yang sesuai dengan permasalahan masyarakat, menetapkan aturan yang membuat partisipasi masyarakat wajib dalam upaya pemberdayaan, dan mengevaluasi setiap program pemberdayaan masyarakat setelah dilaksanakan. Pemerintah gampong berperan sebagai fasilitator yang mendukung masyarakat dan memberikan arahan yang jelas tentang tujuan pemberdayaan yang akan diimplementasikan.

Pemberian bantuan dari pemerintah bisa dianggap telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya memenuhi harapan petani yang

⁷² Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

⁷³ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

⁷⁴ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

membutuhkannya. Hal ini disebabkan oleh pembagian bantuan yang dilakukan secara bergiliran dan tidak berkelanjutan, dengan penjelasan yang bergantian dengan kelompok tani lainnya. Bantuan yang diberikan Pemerintah meliputi obat-obatan, pupuk, alat semprot, modal, dan penyediaan bibit unggul. Sementara itu, untuk para peternak, Pemerintah memberikan bibit ternak seperti anak kambing dan sejenisnya.

Peran pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, dapat dianggap efektif. Pemerintah gampong, dengan pendekatan yang unik, berhasil mengajak masyarakatnya untuk aktif berpartisipasi dalam setiap program pemberdayaan yang diselenggarakan di gampong tersebut. Peran Pemerintah gampong Ujung Pasir dalam pemberdayaan masyarakat di gampong melibatkan peran sebagai fasilitator. Ini mencakup pemberian alat/bahan modal kepada petani dan peternak, motivasi terhadap kelompok tani dan peternak, pengawasan dan pelaksanaan distribusi bantuan, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada petani. Tujuan dari peran ini adalah agar masyarakat gampong dapat merasakan manfaat dari program pemberdayaan masyarakat tersebut.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Ujung Pasir

Sebagai pemimpin masyarakat, seharusnya seorang kepala gampong memahami dengan baik situasi riil masyarakat. Mengetahui kondisi sebenarnya memungkinkan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang tepat. Jika pemimpin tidak memahami kondisi masyarakat, hal tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, pendapat ini disampaikan oleh Bapak Samsul Kamar, yang menjabat sebagai Kepala Gampong Ujung Pasir.

“Salah satu hambatan yang saya hadapi dalam memberdayakan masyarakat adalah minimnya partisipasi mereka. Meskipun pemberdayaan seharusnya melibatkan mereka sebagai pelaku dan memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat, ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Meski begitu, saya berupaya dengan keras untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, agar mereka tertarik dan bersedia berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan tersebut. Munculnya pinjaman yang tidak dilunasi menjadi masalah serius bagi Gampong, dan pemerintah gampong memiliki keterbatasan tindakan. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang mengalami pinjaman macet, kemungkinan mendapatkan pinjaman pemberdayaan pada tahun berikutnya menjadi sangat terbatas, sehingga dampaknya merugikan Gampong karena bantuan tidak optimal secara merata”.⁷⁵

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Suman Usaini, yang menjabat sebagai Kaur Pemberdayaan, dengan menyatakan:

“Dalam usaha memberdayakan masyarakat, keberadaan fasilitas sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan di Gampong. Sebagai contoh, ketika Dinas Pertanian daerah memberikan penyuluhan pertanian, penggunaan pidato tanpa fasilitas membuat warga kurang tertarik dan sulit memahami informasi. Sebaliknya, dengan menggunakan fasilitas seperti laptop, materi dapat disajikan lebih interaktif, memungkinkan warga melihat langsung contoh jenis hama dan cara pengolahan sawah. Oleh karena itu, fasilitas dan peralatan memiliki dampak signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat”.⁷⁶

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Ibu Maria Surpita, yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, dengan menyatakan bahwa:

“Faktor yang memengaruhi peran Pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah pinjaman yang tidak dilunasi. Selain memberikan bantuan infrastruktur, Pemerintah gampong juga menyelenggarakan program pinjaman tanpa bunga untuk penduduk. Meskipun pinjaman ini bersifat ringan, namun jumlah permintaan bantuan dari masyarakat menjadi tinggi. Tantangan muncul ketika peminjam tidak memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman, sehingga Pemerintah dan aparatur gampong terbatas dalam tindakan. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang mengalami pinjaman macet, syaratnya adalah melunasi sebelum dapat

⁷⁵ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 7 November 2023

⁷⁶ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 8 November 2023

kembali mendapatkan pinjaman pemberdayaan pada tahun berikutnya, dan sisa dana akan dialokasikan ke masyarakat lain”.⁷⁷

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ali Judan, yang menjabat sebagai Sekretaris Gampong Ujung Pasir, dengan menyatakan bahwa:

“Salah satu faktor yang memengaruhi peran Pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah kemungkinan minimnya partisipasi masyarakat, yang merupakan tantangan besar bagi Kepala Gampong. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian warga gampong yang lebih fokus pada pekerjaan mereka, sehingga kurang antusias terhadap urusan Pemerintahan, terutama kegiatan pemberdayaan masyarakat”.⁷⁸

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Bapak Edy Asmawar, yang menjabat sebagai Bendahara Gampong Ujung Pasir, dengan menyatakan bahwa:

“Ketidacukupan fasilitas menjadi isu, karena fasilitas sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan gampong. Sebagai contoh, pada penyuluhan pertanian dari dinas pertanian daerah, kurangnya fasilitas mengakibatkan rendahnya minat dan pemahaman warga karena penyampaian hanya berlangsung seperti pidato biasa”.⁷⁹

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ibu PA, SI, seorang tokoh masyarakat, dengan menyatakan bahwa:

“Salah satu faktor yang memengaruhi peran Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat adalah minimnya partisipasi, terkadang saat ada pertemuan, masyarakat enggan hadir, namun jika diberikan insentif finansial, baru masyarakat bersedia datang dalam jumlah besar”.⁸⁰

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Bapak SA, UD, yang merupakan tokoh masyarakat, dengan menyatakan bahwa:

“Faktor yang memengaruhi peran Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat adalah minimnya partisipasi, karena masyarakat lebih fokus pada kegiatan individu mereka sendiri”.⁸¹

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ibu MA, seorang tokoh masyarakat, dengan menyatakan bahwa:

⁷⁷ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

⁷⁸ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

⁷⁹ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

⁸⁰ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

⁸¹ Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

“Faktor yang memengaruhi peran Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat adalah adanya warga yang mengalami pinjaman yang tidak dapat dilunasi. Hal ini disebabkan oleh hasil panen yang kurang memadai, sehingga masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pribadi mereka. Dampaknya, Pemerintah gampong mungkin mengalami kerugian karena dana tersebut seharusnya bersifat rotatif”.⁸²

Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor fasilitas atau teknologi peralatan memiliki dampak pada partisipasi masyarakat dalam pencapaian pemberdayaan. Semakin lengkap dan modern fasilitas atau peralatan teknologi di Gampong, maka partisipasi masyarakat cenderung meningkat, sementara ketidaklengkapannya dapat mengakibatkan penurunan partisipasi masyarakat. Peran Pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas atau peralatan, dan masalah pinjaman yang tidak dilunasi. Pemerintah dan petugas di Gampong memiliki keterbatasan tindakan terhadap warga yang mengalami pinjaman macet. Oleh karena itu, bagi mereka yang menghadapi masalah tersebut, kemungkinan tidak akan mendapatkan lagi pinjaman pemberdayaan pada tahun berikutnya.

C. Pembahasan

1. Peran Pemerintah Gampong

Pemerintah gampong Ujung Pasir berperan sebagai penyedia fasilitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat menyelaraskan kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan kemajuan gampong. Pemerintah desa sebagai penyedia dukungan aktif di sektor pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, dan juga dalam aspek

⁸² Hasil Wawancara Terhadap Bapak Usman Usaini Pada 9 November 2023

permodalan dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang sedang diberdayakan.

Pemerintah berfungsi sebagai penyedia fasilitas dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan pembangunan, menjembatani berbagai kepentingan untuk mengoptimalkan perkembangan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah berupaya menciptakan suasana tertib, nyaman, dan aman, termasuk menyediakan sarana serta prasarana pembangunan melalui pembinaan dan pendanaan/permodalan. Dukungan fasilitas untuk sektor pertanian dianggap memadai, dengan pemerintah memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar bersama-sama terlibat dalam proses pembangunan. Masyarakat memahami peran dan posisinya dalam pembangunan desa. Mereka menyadari betapa pentingnya keterlibatan mereka dalam mengawasi dan menentukan arah pembangunan. Dengan demikian, keduanya memiliki visi yang serupa, saling mendukung, dan meraih manfaat yang seimbang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala gampong berperan sebagai fasilitator dengan konsisten memberikan bantuan modal melalui program pemberdayaan masyarakat, termasuk pembangunan daerah, pemberdayaan perempuan, sektor pertanian, dan peternakan. Selain itu, dalam sektor kesehatan, gampong memberikan fasilitas berupa rumah kesehatan bagi masyarakat Ujung Pasir..

2. Program-Program Gampong

Adapun program-program gampong Ujung Pasir yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1) Program pembangunan daerah

Program pembangunan daerah adalah inisiatif utama yang direncanakan untuk dilaksanakan selama satu periode, bertujuan untuk mengatasi masalah dan isu strategis serta memenuhi kebutuhan yang dirasakan, dengan maksud memaksimalkan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Kecamatan Kluet Selatan, Gampong Ujung Pasir, mencakup serangkaian inisiatif prioritas yang terkait secara khusus dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah deklarasi yang merangkum program-program prioritas secara strategis dari kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan.

2) Program pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi dalam hal luas, pengawasan, pengambilan keputusan, serta transformasi yang bertujuan mencapai kesetaraan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Meningkatkan peran perempuan melalui pemberdayaan menjadi strategi krusial untuk memperkuat potensi individu mereka, sehingga mampu mandiri dan berkarya dengan lebih efektif. Peningkatan kesadaran terhadap peran perempuan termanifestasi dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Konsep ini berakar pada ide bahwa kemandirian perempuan diperlukan agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komunitas, mengingat perempuan merupakan aset berharga yang harus terlibat secara aktif dalam proses pembangunan.

3) Program pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian dan peternakan

Masyarakat Tani di Gampong Ujung Pasir mendapatkan pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat lebih efektif mengelola pertanian dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Di Gampong Ujung Pasir, terdapat kelompok pertanian yang dibentuk oleh masyarakat melalui Dinas Pertanian. Kelompok Tani adalah lembaga aktif yang diharapkan oleh Pemerintah pusat untuk selalu siap membantu petani dalam mengelola pertanian, dengan dampak positif terutama pada peningkatan pendapatan ekonomi petani dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Gampong Ujung Pasir.

Pemberdayaan masyarakat adalah inisiatif yang termasuk dalam program pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun gampong. Tujuan dari program ini adalah memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mendorong perkembangan dan mendukung kemajuan gampong. Program pemberdayaan masyarakat di gampong melibatkan berbagai sektor, seperti pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi, teknologi, dan pendidikan.

4) Pemberdayaan masyarakat dalam sektor kesehatan

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses untuk membangkitkan kesadaran, keinginan, dan keterampilan masyarakat dalam merawat dan meningkatkan kesehatan. Dalam konteks kesehatan, pemberdayaan masyarakat mengacu pada upaya untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, merawat, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Tujuan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yaitu:

1. Tumbuhnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman akan kesehatan bagi individu, kelompok dan masyarakat berupa:
 - a. Pengetahuan dan kesadaran tentang cara-cara memelihara dan meningkatkan kesehatan awal dari keberdayaan masyarakat.
 - b. Belajar alih pengetahuan informasi kesehatan kesadaran akan kesehatan hasilnya adalah pengetahuan kesehatan.
2. Timbulnya kemauan atau kehendak ialah sebagai bentuk lanjutan dari kesadaran dan pemahaman terhadap obyek, dalam hal ini kesehatan. Kemauan menjadi tindakan tergantung berbagai faktor, faktor utama ialah adanya sarana dan prasarana.
3. Timbulnya kemampuan masyarakat di bidang kesehatan telah mampu mewujudkan kemauan/niat dalam bentuk tindakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan berikut ini:

1. Peran Pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan adalah belum maksimal. Namun, beliau dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong. Adapun peran Pemerintah gampong Ujung Pasir dalam pemberdayaan masyarakat di gampong yaitu sebagai fasilitator.
2. Program-program yang dilakukan yaitu program pemberdayaan masyarakat seperti adanya pembangunan daerah, pemberian pupuk dalam sektor pertanian dan bibit pada sektor peternakan hingga layanan kesehatan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi peran pemerintah gampong dalam mensejahterakan masyarakat gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan adalah kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya fasilitas atau peralatan, serta pinjaman macet.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Kepala gampong lebih meningkatkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan

masyarakat yang ada di gampong Ujung Pasir semakin berkembang dan agar warga masyarakat gampong lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi.

2. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan karena masyarakat merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ahmad Erani Yustika. (2013). *Ekonomi Kelembagaan, Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 43.
- Andi Meuthia. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba*. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*. Hlm. 82.
- Awang, Azam. (2010) *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bayu Suryanigrat. (1970). *Pemerintah Administrasi Gampong dan Kelurahan*. (Jakarta: Aksara Baru).
- Bernandus Oktavianus. *Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Gampong Dalam Pemembangun di Gampong Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman*, Vol. 2. Nomor 1. Hlm. 2051-2062.
- Deddy Mulyana. (2004). *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Feri Andi. (2017). *Peran Majelis Ta'lim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan (Studi terhadap Majlis Ta'lim Nurul Hidayah)*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Raden Fatah Palembang. Hal. 22.
- Goestyari Kurnia Amantha. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Gampong Way Urang)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. Volume 47. No.1. Hlm. 67-79.
- Widjaja. HAW. (2001). *Pemerintah Gampong/Marga*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Harrison Papande Siregar. (2012). *Peran Pemerintah Gampong Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pada Sektor Industri Kecil Dan*

- Rumah Tangga (IKRT): Pembangun Gampong Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. (Skripsi Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia).
- Josep Riwu Kaho. (1991). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: CV.Rajawali).
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. (Jakarta: Erlangga).
- Lidya Agustina. (2009). *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*, Jurnal Akuntansi Vol.1 No.1. Hlm. 40-69.
- Mahmudi. (2013). *Peran Pemerintah Gampong Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Gampong Borosot Kecamatan Galur Kabupaten Kilon Parago Ditinjau Dari Inpres No 3 Tahun 2010*, (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yokyakart).
- Mardalis. (2006). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Mario Juan C.S. Hidete, Arie J. Rorong, Novie. R. A. Palar. (2022). *Peran Pemerintah Gampong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Mawe Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara*. *JAP*. No. 114. Vol. VIII.
- Minardi. (2015). *Peran Pemerintah Gampong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Dlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta*. *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Muh. Arifin, Alimuddin Said, Andi Nuraeni Aksa. (2013). *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. *Otoritas*. Vol. III. No. 2. Hlm. 125.
- Muhammad Daud, Yushita Marini. (2018). *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*, Jurnal Humaniora Volume 2, No. 1.
- Muhammad Ramli. (2008). *Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan*.

- Nartin, Yuliana Musin. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *Sibatik Journal*. Vol.1. No. 3. Hlm. 163.
- Nurul Izzati Lubis. (2019). *Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Hlm 18.
- Pamuji. (2000). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahayu, Budiana. (2008). *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*, MG, Semarang.
- Rendi Perima Wardhana, peran masyarakat Gampong dalam mensejahterakan masyarakat Gampong Melalui badan milik Gampong (BUMdes), (Studi Di Gampong Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang).
- Ruttan VW dan Hayami Y. (1984). Toward a theory of induced institutional innovation. *Journal of Development Studies*. Vol 20: 22-203.
- Sarif Hidayat. (2013). *Dampak Sosial Ekonomi Perogeram Nasional Pemerdayaan Masyarakat Mandiri Persedaan (PNPM-PM) Terhadap Kehidupan Masyarakat*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).
- Soebardhy. (2020). *Muchlas Samani, Dkk, Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan, Jawa Timur : Qiara Media).
- Soejarno Soekanto. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: CV Rajawali)
- Soemantri, Bambang Trisantoso. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung.
- Sony Keristiano. (2013). Peran Pemerintah Gampong Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Gampong Lidung Kemenci Mantarng Kabupaten Malinau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Fakultas ilmu Sosial dan Politik. Universitas Malawarman, Vol 1.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: AFABETA, CV).
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: Refika Aditama).
- Sultan Muhammad Zain Kamus Moderen Bahasa Indonesia. Hlm.165.

- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*, (Yogyakarta:CV Budi Utama). Hal 194.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset).
- Swasono, Sri Edi. (2004). *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*. (Yogyakarta: Pustep UGM)
- Taliziduhu Ndraha. (2000). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Gampong*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Uhar Suharsaputra. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung : Refika Adimata).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong.
- W. J. S. Poerwadarminto. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN.Balai Pusaka).
- Wahyuni. Strategi Pemerintah Gampong Dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Gampong Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. (*Skripsi: Maanajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*).
- Wasistiono. Sadu. (2001). *Buku Materi Pokok Administrasi Pemerintahan Gampong*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wayan Suwendra. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, (Bandung: NILACAKRA).

LAMPIRAN

Instrumen Wawancara

A. Pertanyaan Untuk Keuchik

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong Ujung Pasir?
2. Apa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Bantuan apa saja yang diberikan pemerintah Gampong?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?
5. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam efisiensi tersebut?
6. Apakah ada pembatasan program, baik dalam jenis program maupun sasaran program?

B. Pertanyaan Untuk Sekretaris Gampong

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong Ujung Pasir?
2. Apa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Bantuan apa saja yang diberikan pemerintah Gampong?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?
5. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam efisiensi tersebut?
6. Apakah ada pembatasan program, baik dalam jenis program maupun sasaran program?

C. Pertanyaan Untuk Bendahara Gampong

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong Ujung Pasir?

2. Apa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Bantuan apa saja yang diberikan pemerintah Gampong?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?
5. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam efisiensi tersebut?
6. Apakah ada pembatasan program, baik dalam jenis program maupun sasaran program?

D. Pertanyaan Untuk Kasie Pemerintahan

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong Ujung Pasir?
2. Apa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Bantuan apa saja yang diberikan pemerintah Gampong?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?
5. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam efisiensi tersebut?
6. Apakah ada pembatasan program, baik dalam jenis program maupun sasaran program?

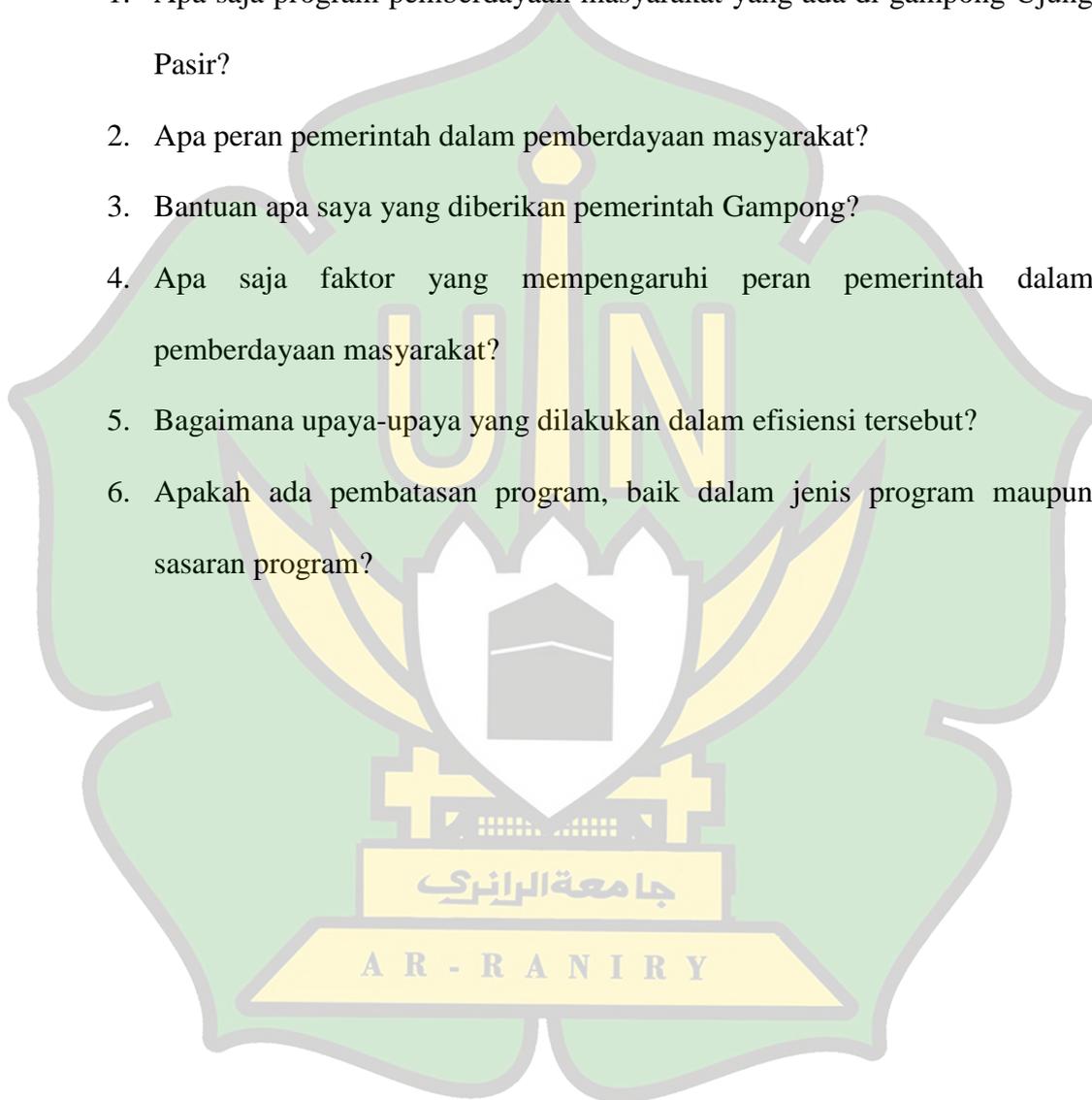
E. Pertanyaan Untuk Kasie Kesejahteraan

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong Ujung Pasir?
2. Apa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Bantuan apa saja yang diberikan pemerintah Gampong?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?

5. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam efisiensi tersebut?
6. Apakah ada pembatasan program, baik dalam jenis program maupun sasaran program?

F. Pertanyaan Untuk Masyarakat Gampong

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong Ujung Pasir?
2. Apa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Bantuan apa saja yang diberikan pemerintah Gampong?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat?
5. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam efisiensi tersebut?
6. Apakah ada pembatasan program, baik dalam jenis program maupun sasaran program?





Dokumentasi Wawancara Dengan Sekretaris Gampong



Dokumentasi Wawancara Dengan Kheucik



Dokumentasi Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan



Dokumentasi Wawancara Dengan Kheucik



Dokumentasi Wawancara Dengan Bendahara



Dokumentasi Wawancara Dengan Kasi Kesejahteraan